



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN

2 0 1 2

Nomor : LAP-351/PW30/1/2013
Tanggal: 30 Januari 2013

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2012 disusun dan disajikan sebagai upaya pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi dan aturan ini mengharuskan semua instansi pemerintah untuk menyajikan LAKIP sebagai mata rantai dari siklus akuntabilitas kinerja yang memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Alat (instrumen) bagi Perwakilan BPKP Provinsi Banten untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Kepala BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD/BUL).
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, LAKIP secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2012. Rencana kinerja tahun 2012 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2012 yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP 2010-2014. Sedangkan capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2012 yang diarahkan untuk memenuhi target dalam penetapan kinerja tahun 2012 dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2010-2014.

LAKIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2012 dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2012 dan target IKU tahun 2012 serta mengukur capaian kinerja terhadap target pada akhir periode rencana tahun 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah memuaskan dengan tercapainya sebagian besar IKU. Hasil analisis capaian kinerja, baik yang telah memenuhi sasaran

maupun yang belum, akan menjadi bahan rencana perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang, sehingga capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dapat lebih ditingkatkan.

Semoga LAPK tahun 2012 ini dapat memberikan arti bagi para pengguna dan menunjukkan peran yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Jakarta, 30 Januari 2013

Wakil Perwakilan,



Rehan Budiasat

NIP. 3250 0422 196403 2 001

Ringkasan Eksekutif

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), berarti BPKP memasuki babak baru dimana ditegaskan bahwa peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Dengan babak baru tersebut BPKP membenahi diri dengan mengadakan reposisi dan revitalisasi yang diawali dengan merumuskan Visi, Misi, dan Strategi yang baru dan dilanjutkan dengan penyusunan Program dan Kegiatan.

Dengan paradigma baru, Perwakilan BPKP Provinsi Banten berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah di wilayah Provinsi Banten untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Sesuai PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP, BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2012 BPKP telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis dikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

Dalam tahun 2012 ini, Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menetapkan delapan sasaran strategis. Sasaran Strategis tersebut diukur dengan tiga puluh empat IKU, yang terdiri dari sebelas IKU dominan dan dua puluh tiga IKU lainnya. Untuk mewujudkan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Banten melaksanakan 3 Program dengan 445 Kegiatan. Realisasi pencapaian target outcome selama tahun 2012 rata-rata telah mencapai target.

Penilaian sendiri (self assessment) atas Penetapan Kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar IKU outcome telah direalisasikan. Demikian juga dengan program-utama dan program pendukung dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada tahun 2012 telah mengalokasikan pembiayaan program dan kegiatan sebesar Rp24.574.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.101.923.273,00 atau 69,31% dari total anggaran. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan anggaran gaji tunjangan tidak dapat diang sebagai akibat banyaknya pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Banten yang dimutaskan ke unit BPKP lainnya pada awal tahun 2012. Selain anggaran tersebut, kegiatan Perwakilan juga didukung pendanaan dari BPKP.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak lima dari delapan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah tercapai sesuai target. Capaian kedelapan IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1.
Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas 95% LKRL dan 80% LKPD	115,45%
2	Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50%	115,23%
3	Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD	78,23%
4	Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan KUPemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	102,95%
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPMP di 70%	160,26%
6	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% KUPemda	47,62 %
7	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%	98,52%

8	Terselenggaranya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan	100,10%
---	--	---------

Raterhasilan: capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 34 IKU yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tapkin BPKP Tahun 2012.

Pengukuran Kinerja kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang belum mencapai target. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut data sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 80% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian tujuh IKU, terdiri dari dua IKU dominan dan lima IKU lainnya, dengan rata-rata capaian sebesar 110,49%. Walaupun capaian rata-rata IKU telah melebihi target namun secara individu masih terdapat IKU yang belum mencapai target yaitu IKU "Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan" (83,33%) dan IKU "Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat" (92,31%). Untuk itu perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan Inspektorat instansi yang bersangkutan untuk mengatur penjadwalan pengurusan pendampingan IPP dalam penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pusat (Deputi Rencan) berkaitan dengan pengawasan lintas sektor untuk lebih memaksimalkan kemungkinan tercapainya target KF 1.

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian dua IKU, terdiri dari satu IKU dominan dan satu IKU lainnya, dengan rata-rata capaian sebesar 115,23%. Tingginya rata-rata capaian IKU tersebut terutama disebabkan tingginya persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang telah diindikasikan.

3. Tercapainya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMD

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU, terdiri dari dua IKU dominan dan satu IKU lainnya, dengan rata-rata capaian sebesar 78,23%. Tidak tercapainya IKU ini disebabkan Pemerintah Daerah belum maksimal melakukan pembinaan penerapan SPM, dan kurangnya minat dan BUMD (PDAM) dalam mengimplementasikan GCGKPI. Rencana tindak yang akan dilakukan adalah meningkatkan upaya tindak lanjut terhadap hasil audit kinerja untuk lebih mendorong pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal (SPM), dan meningkatkan kerja sama dengan BUMD (PDAM) dalam rangka implementasi GCGKPI.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Penda, BUMD/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian tujuh IKU, terdiri dari satu IKU dominan dan enam IKU lainnya, dengan rata-rata capaian sebesar 102,65%. Walaupun capaian rata-rata IKU telah melebihi target namun secara individu masih terdapat IKU yang belum mencapai target yaitu IKU "Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi" (26%) dan IKU "Persentase pelaksanaan pengujian HKP, klaim dan penyesuaian harga" (24,44%). Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kerjasama dan publikasi dengan Kelompok Masyarakat dalam upaya menjangkau minat kelompok masyarakat terhadap permasalahan korupsi, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal ataupun instansi pemerintah daerah untuk menjangkau peluang mediasi terkait dengan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan maupun penyesuaian harga, dan klaim.

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Penda

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU, terdiri dari satu IKU dominan dan dua IKU lainnya, dengan rata-rata capaian sebesar 160,20%. Tingginya pencapaian IKU ini utamanya karena keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam membina SPIP pada

Memegang Daerah yang secara konkrit dibuktikan dari adanya peningkatan opini BPK RI terhadap 4 LKPD yang memperoleh opini WTP.

6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% KLU/Permda

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian satu IKU dominan, dengan capaian sebesar 47,62 %. Rendahnya capaian IKU ini disebabkan belum intensifnya pembinaan APIP karena kurangnya pemantauan dari instansi APIP untuk meningkatkan kapasitasnya. Untuk itu diperlukan usaha intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat serta meningkatkan pembinaan tata kelola APIP Daerah.

7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian sepuluh IKU, terdiri dari dua IKU dominan dan delapan IKU lainnya, dengan rata-rata capaian sebesar 98,52%. IKU yang belum mencapai target diantaranya terkait dengan kelemahan proses internal yang ditunjukkan dari hasil survei internal yang belum mencapai target seperti kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian, pelayanan keuangan dan pelayanan sarana prasarana, serta rendahnya intensitas publikasi kegiatan. Untuk itu akan dilakukan identifikasi permasalahan pada proses fungsi dukungan khususnya kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana (Umum) untuk segera dilakukan perbaikan, serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai media massa baik lokal maupun nasional agar kegiatan-kegiatan perwakilan BPKP Provinsi Banten dapat diliput oleh media massa.

8. Terlengkapannya 70% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan

Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian satu IKU dominan, dengan capaian sebesar 100,10%. Capaian IKU ini diperoleh dari implementasi 13 dari 14 aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang tersedia namun yang menjadi target IKU tahun 2012 adalah sebanyak 8

aplikasi SIM sehingga capaian IKU tahun 2012 adalah 100,10%. Adapun satu aplikasi SIM yang belum diimplementasikan adalah aplikasi SPPD.